

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Revolusi Industri 4.0 merupakan istilah yang pertama kali muncul pada tahun 2011 di Jerman (Henri, 2018). Revolusi ini ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital informasi (digitalisasi) secara penuh dan menyeluruh di berbagai negara. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan sistem informasi (SI) berkembang dengan cepat serta memberi dampak yang sangat luas di berbagai sektor industri suatu negara. Menurut hasil penelitian Mckinsey dalam Henri (2018), perkembangan teknologi yang sangat cepat ini dipicu oleh peningkatan pemanfaatan robot dan mesin digital.

Revolusi industri 4.0 menciptakan banyak teknologi canggih yang diharapkan dapat memudahkan pekerjaan manusia. Algoritma komputer yang ditanamkan pada teknologi, semakin lama semakin baik dalam kurun waktu yang cukup singkat. Artinya seiring bertambahnya waktu, maka dimungkinkan pekerjaan manusia semakin mudah. Namun apabila tidak mengikuti perkembangan, setiap individu atau organisasi akan tertinggal. Dengan kata lain,

perkembangan teknologi ini bagaikan tuntutan untuk terus bergerak menuju perkembangan yang tidak bisa dibayangkan.

Teknologi digital saat ini telah menjadi fokus pemerintah suatu negara untuk mengelola keuangan demi peningkatan ekonomi dan pembangunan nasional. Gupta et al. (2018, dikutip dalam Siallagan, 2019) menjelaskan bahwa digitalisasi keuangan beberapa negara digunakan untuk: pembayaran pajak menggunakan *mobile phones* di Kenya; pemantauan data upah yang diberikan oleh pemberi kerja secara *real time* di Australia; dan penggunaan *platform* yang dapat menghubungkan sektor publik dengan perusahaan-perusahaan sektor privat secara gratis di Estonia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak revolusi industri 4.0. Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Negara Terintegrasi atau *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS) sebagai pemantik digitalisasi yang diperkenalkan pada tahun 2011 (Siallagan, 2019). IFMIS dikembangkan pemerintah untuk mengelola anggaran dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, memonitor anggaran, hingga pelaporan anggaran.

Sistem digitalisasi utama IFMIS dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan diberi nama SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Sejalan dengan perkembangan, DJPb juga mengembangkan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Tingkat Instansi) yang digunakan instansi/satuan kerja (satker) untuk mengelola perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan

pelaporan anggaran terkait dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk mengelola dana yang bersumber dari APBN, diperlukan beberapa modul aplikasi yang berbeda sesuai dengan fungsi pengelolaannya, serta memiliki relasi atau interkoneksi satu sama lain. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.05/2021 terkait implementasi aplikasi SAKTI, disebutkan sembilan jenis modul yang memiliki interkoneksi, yaitu (1) modul administrasi; (2) modul penganggaran; (3) modul komitmen; (4) modul bendahara; (5) modul pembayaran; (6) modul persediaan; (7) modul aset tetap; (8) modul piutang; dan (9) modul akuntansi dan pelaporan.

Penerapan aplikasi SAKTI di seluruh tingkat unit pemerintahan hingga tingkat satuan kerja (satker) bersifat wajib (*mandatory*) didasari dengan terbitnya PMK Nomor 223/PMK.05/2015 yang membahas tentang pelaksanaan *piloting* (uji coba) aplikasi SAKTI. Peraturan ini mengalami beberapa perubahan pada tahun-tahun berikutnya hingga peraturan yang terbaru adalah PMK Nomor 171/PMK.05/2021.

Berdasar hal yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Semua upaya pemerintah dalam digitalisasi tentunya tidak lepas dari paket Undang-Undang (UU) Keuangan Negara, yaitu (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 yang membahas tentang keuangan negara beserta ruang lingkupnya; (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 terkait kegiatan dalam lingkup perbendaharaan negara; dan (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 terkait pemeriksaan serta tanggung jawab atas keuangan negara.

SAKTI adalah salah satu proyek besar yang dibiayai dengan anggaran yang cukup banyak. Hal ini juga dilihat dari segi waktu, tenaga, serta pikiran yang dikeluarkan (Pambudi & Adam, 2018). Sumber daya (*resource*) yang cukup besar tersebut pasti juga diinginkan sebuah kesuksesan atau keberhasilan dalam implementasi sebagai *return* dari segi biaya (*cost*) maupun manfaat (*benefit*). Berdasar data dari Sauer dan Cuthbertson (2003, dikutip dalam Pambudi & Adam, 2018), hanya sekitar 16% implementasi teknologi yang mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, kesuksesan implementasi SAKTI sangat diprioritaskan bagi DJPb.

Tingkat kesuksesan implementasi SAKTI menarik untuk diteliti dan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan menganalisis persepsi dan kendala pengguna (*user*) aplikasi SAKTI pada tingkat instansi. Namun, bahasan penelitian ini dipersempit hanya pada modul penganggaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) yang diatur dalam PMK No. 208/PMK.02/2019.

Model analisis yang digunakan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah *Model for Mandatory Use of Software Technologies* (MMUST) yang diperkenalkan oleh Koh et al. (2010) sebagai penyempurna model-model sebelumnya. Model ini dirancang untuk menganalisis pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat *mandatory* sehingga cocok digunakan untuk menganalisis implementasi aplikasi SAKTI. Model analisis ini jarang digunakan pada penelitian yang sudah dipublikasikan terutama di Indonesia. Sejauh Karya Tulis ini dibuat, model analisis kesuksesan informasi DeLone & McLean (1992, 2003)

masih mendominasi penelitian terkait sistem informasi termasuk implementasi aplikasi SAKTI pada beberapa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) beserta satker mitra kerjanya. Sebagai tambahan informasi, jenis penelitian terkait implementasi sistem informasi pada KPPN Madiun beserta satker mitra kerjanya belum ditemukan atau mungkin belum dilakukan. Apalagi, penelitian sistem informasi dengan model analisis MMUST.

Hal-hal yang telah diuraikan dan dijelaskan sebelumnya melatarbelakangi penelitian terkait implementasi aplikasi SAKTI modul penganggaran dalam penyusunan RKAKL menggunakan model MMUST pada satker mitra kerja KPPN Madiun. Hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut tersusun dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Implementasi Aplikasi SAKTI Modul Penganggaran (RKAKL) pada Satker Mitra Kerja KPPN Madiun Tahun 2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan, maka diperoleh beberapa rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir sebagai berikut.

1. Bagaimana persepsi satker terhadap implementasi aplikasi SAKTI modul penganggaran dalam penyusunan RKAKL pada satker mitra kerja KPPN Madiun?
2. Apa hambatan/kendala implementasi aplikasi SAKTI modul penganggaran dalam penyusunan RKAKL pada satker mitra kerja KPPN Madiun?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, yaitu:

1. Menganalisis persepsi satker terhadap implementasi aplikasi SAKTI modul penganggaran dalam penyusunan RKAKL pada satker mitra kerja KPPN Madiun; dan
2. Menganalisis hambatan/kendala implementasi aplikasi SAKTI modul penganggaran dalam penyusunan RKAKL pada satker mitra kerja KPPN Madiun.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penelitian diberi beberapa batasan agar bahasan Karya Tulis Tugas Akhir tidak melebar pada hal-hal yang tidak relevan. Batasan-batasan tersebut meliputi topik bahasan yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu analisis hambatan/kendala dan persepsi satker mitra kerja KPPN Madiun terhadap implementasi aplikasi SAKTI modul penganggaran dalam penyusunan RKAKL. Data penelitian yang digunakan dan diolah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini diperoleh tidak lebih dari bulan April tahun 2022.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu secara teoritis dan secara praktis (Rahim, 2020). Secara teoritis, hasil dari penelitian dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam lingkup ilmu pengetahuan berupa

penambahan wawasan di bidang perencanaan anggaran negara khususnya implementasi aplikasi SAKTI modul penganggaran dalam penyusunan RKAKL.

Secara praktis, hasil dari penelitian dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak berikut.

1. Bagi penulis, hasil penelitian dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir dapat menjadi sarana untuk mengembangkan pemahaman terkait implementasi aplikasi SAKTI modul penganggaran dalam penyusunan RKAKL khususnya pada satker mitra kerja KPPN Madiun.
2. Bagi para peneliti selanjutnya, hasil penelitian dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir diharapkan dapat memberikan pijakan dan kontribusi untuk memperluas pandangan atau gagasan dalam penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb), hasil penelitian dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir dapat digunakan sebagai evaluasi implementasi aplikasi SAKTI dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan sistem aplikasi SAKTI apabila diperlukan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir meliputi empat bab, yaitu (1) bab pendahuluan; (2) bab landasan teori; (3) bab metode dan pembahasan; dan (4) bab simpulan. Rincian isi dari tiap-tiap bab tersebut diuraikan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi gambaran awal Karya Tulis Tugas Akhir yang dideskripsikan secara keseluruhan. Gambaran awal dalam bab ini ditulis dalam rangka pengenalan latar belakang masalah yang diteliti dan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir, rumusan masalah secara spesifik berdasar latar belakang yang telah diuraikan, tujuan penulisan untuk menjawab rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan sebagai pembatas pokok bahasan, manfaat penulisan bagi beberapa pihak, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab landasan teori berisi teori, ketentuan, dan/atau penjelasan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir. Bab ini menjadi landasan untuk melakukan tinjauan, analisis, dan evaluasi dalam bab pembahasan. Landasan teori yang dijelaskan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain terkait dengan konsep perencanaan anggaran, konsep Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), revolusi industri 4.0 dan digitalisasi, aplikasi SAKTI, dan model kesuksesan *Model for Mandatory Use of Software Technologies* (MMUST).

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab metode dan pembahasan berisi penjelasan tentang metode penelitian dan metode pengumpulan data yang relevan dengan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir serta masalah yang diteliti. Dalam bab ini juga diuraikan pembahasan terkait objek penelitian beserta masalah-masalah yang telah diteliti dan dianalisis menggunakan metode serta model penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya.

Objek penelitian yang dimaksud adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun beserta satker yang menjadi mitra kerjanya. Hal yang dibahas dalam bab ini adalah kendala implementasi aplikasi SAKTI modul penganggaran untuk menyusun RKAKL pada satker mitra kerja. Selain itu, dalam bab ini dibahas persepsi pengguna aplikasi untuk mengukur kesuksesan implementasinya.

BAB IV SIMPULAN

Bab simpulan berisi simpulan yang telah diambil dari uraian dan hasil penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini, disederhanakan jawaban atas beberapa rumusan masalah yang tidak lepas dari tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.